

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfan, M. T. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap aturan money politic dalam Undang-Undang pemilihan umum di Indonesia (Studi Pasal 515 Undang-Undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum). IAIN Padangsidimpuan.
- Arifin, Zainal & Arifudin. (2017). *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aspinall, E., Sukmajati, M., & Universitas Gadjah Mada. Research Centre for Politics and Government. (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Assiddiqie, Jimly (2004). *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*. Yogyakarta: UU Press
- Budiardjo, Miriam (Eds.). (1981). *Partisipasi Dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia Hlm. 2.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Mycological Research, 94(4).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994, Hlm. 965.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamendia Group. Hlm 16.
- Goffar, Janedri M (2012). *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Lessig, L. (2019). *They Don't Represent Us And Here's How They Could: A Blueprint for Reclaming Our Democracy* (pp. 40–85). New York: Harper Collins Publishers.
- Mahfud MD, Moh (2014). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm. 60.
- Maria, L., & Marendra, D. (2020). *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Nugroho, Heru (2011). *Uang, Rentenir, Dan Hutang Piutang Di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 95.
- Perludem. (2024). *Handbook Buku Panduan: Partisipasi Pemuda Pada Pemilu Serentak 2024*. Jakarta: Perludem.
- Sumartini, (2004). *Money Politics Dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional
- Surbakti, Ramlan Dkk, (2018). *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, Dan Penyalahgunaan Uang Pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan
- Surbakti, Ramlan. (2003). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo Hal. 118.

Jurnal

- Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan," *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021).
- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan. *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2).
- Amal, I. (2022). Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu Di Provinsi Banten. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(3), 592–606.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (1st Ed.). Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jl.
- Bari, F. (2023). Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 268–282.
- Budiyanti, A. (2022). Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1–10.
- Cucu Sutrisno (2017). "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada". *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 2, No 2.
- Fauzi, F. Z., & Kusumasari, B. (2020). Public-private partnership in Western and non-Western countries: a search for relevance. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 26(1), 87–102. <https://doi.org/10.1108/JFMPC-08-2019-0071>
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1).
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1).
- Fitriyah, (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada Dan Pilkadaes Di Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilihan Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10>
- Fitriyah. (2013). Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol 3, No. 1 Hlm. 2
- Fitriyah, L., & Haryanto, D. (2023). "Edukasi Politik dan Pencegahan Politik Uang di Pemilu Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*, 18(2), 145-160.
- Fryda Lucyani, D. (2009). Bab I Pendahuluan & pendidikan politik. *Journal Information*, 10(3), 1–16.
- Hakim, A., & Widodo, P. (2021). "Kemandirian Ekonomi dan Hubungannya dengan Politik Uang." *Jurnal Ekonomi Desa*, 9(3), 210-225.
- Halili, "Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)", *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)* 14 , no. 2, (2009): 100. accessed Oktober 10, 2024, <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/2636>.
- Halili. (2009). Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)*, 14(2), 100. Diakses pada 10 Oktober 2024, dari <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/2636>.

- Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1>
- Hariman Satria. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1>.
- Hutapea, D., Nababan, D. I., & Sijabat, O. (2024). Perbandingan Dan Tantangan Yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Pilpres Pada Tahun 2019 & 2024. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 8(4), 96–103.
- Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat, *Justitia Et Pax (JEP)*. Vol 35, No. 1, Juni 2019.
- Ismail, & Fakhris Lutfianto Hapsoro. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Justitia Et Pax (JEP)*, 35(1).
Kabupaten Pati. *Politika*: 2 (No.2).101-111
- Lukas Normank Kbare. (2012). Pengaruh Money Politik Dalam Menentukan Kualitas Pemilu di Indonesia. *Jurnal Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Lukmajati, Dendy. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora). *Politika*: Vol.7, No 1.
- Lukmajati, Dendy. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora). *Politika*, 7(1).
- Melfa, W. (2013). Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 2. Pp. 211–217.
- Monintja, C. K., Lapian, M., & Tulung, T. E. (2017). *Faktor-Faktor Pelanggaran Politik Uang Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Muhtadi, Burhanuddin. (2019). Politik Uang Dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Anti korupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 55-74
DOI:<https://doi.org/10.32697/Integritas.V5i1.413>
- Putri, Magda dkk. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 19 Desember 2020.
- Prasetyo, T. (2023). "Pengaruh Kampanye Berbasis Program terhadap Kepercayaan Pemilih." *Jurnal Komunikasi Politik*, 15(4), 300-315.
- Qonita Hamidah. (2017). Implikasi Regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Money Politic Melalui E-Wallet Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 7.
- RRizkydani, Imam. (2022). Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (Money Politik) Di Pemilihan Umum. *SUPREMASI HUKUM*, 18(02).
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia, *Crepido*, Vol. 02, No. 02, Pp. 85-96
- Rossana, E. (2016). Negara Demokrasi Dan Hak Aksasi Manusia. *Jurnal Tapis Vol.12 No.1*, 37-53.

- Suryani, R., et al. (2022). "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Politik Uang." *Journal of Electoral Studies*, 12(1), 89-102.
- Suswanta, Perhat. (2021). Bentuk Dan Jaringan *Patron-klien* Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, Vol 2, No 3, Hal 170-183.

Skripsi/Internet

- Afifudin. (2020). Dugaan Politik Uang Tidak Dilanjutkan. *Joglojateng.Com*. Diakses pada 10 Juni 2024, pukul 18.00 WIB. <https://joglojateng.com/2020/12/18/dugaan-politik-uang-tidak-dilanjutkan/>.
- Bawaslu. (2024). Pemilu 2024. *Bawaslu RI*. Diakses pada 10 Juni 2024, pukul 18.00 WIB. <https://pemalang.bawaslu.go.id/>.
- Candheki, B. (2020). Pilkades Serentak Pemalang Dibayangi Politik Uang, Tutuko: Masyarakat Sudah Cerdas. *Puskapik.Com*. Diakses pada 10 Juni 2024, pukul 18.00 WIB. <https://www.puskapik.com/14523/seputar-pantura/pilkades-serentak-pemalang-dibayangi-politik-uang-tutuko-masyarakat-sudah-cerdas/>.
- Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. (2004). Politik Uang. *Wikipedia*. Diakses pada 20 Juni 2024, pukul 17.00 WIB. http://id.wikipedia.org/wiki/politik_uang.
- Febriana, Riska. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung. Skripsi Program Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hidayat, Syarief (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019. Skripsi, Universitas Raden Fatah Palembang.
- Putri, Adisty Farida. (2024). Syarat-Syarat Kepala Negara Menurut Pasal 169 Hunuf D Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024. BS Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saputro, Safrudin H. (2010). Politik Uang. *KPU Pemalang*. Mencermati Ongkos Politik dan Money Politik dalam Pemilukada. Diakses pada 11 Juni 2024, pukul 17.00 WIB. <http://kpupemalang.wordpress.com/2010/04/22/politik-uang/>.
- Wismabrata, M. H. (2024). Kasus Politik Uang Jelang Pemilu. *KOMPAS*. Diakses pada 11 Juni 2024, pukul 17.00 WIB. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2024/05/15/11312871/mk-perintahkan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-labuhanbatu-selatan-di-16-tps>.